

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bakhri, Syaiful, 2010, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.
- Effendy, Marwan, 2005, *Kejaksaan Republik Indonesia: Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hakim, Lukman, 2012, *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah*, Setara Press, Malang.
- Hamzah, Andi, 2009, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harris, 1978, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Yang Terdapat Dalam HIR*, Firma Ekonomi, Bandung.
- Hadisoeperto, Hartono, 2011, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Marbun dan Moh. Mahfud, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT Alumni, Bandung.
- Prakoso, Djoko, 1984, *Tugas dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Poernomo, Bambang, 1988, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Amarta Buku, Yogyakarta.
- Simanjuntak, Nikolas, 2009, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zulkarnain, 2013, *Praktik Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2298).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2298).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B-401/E/9/93 tentang Pelaksanaan Tugas Prapenuntutan.

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B-536/E/11/1993 tentang Melengkapi Berkas Perkara Dengan Melakukan Pemeriksaan Tambahan.

Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

### C. Hasil Penelitian dan Penulisan Hukum

Arisma, Yulya, 2012, *Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tahap Prapenuntutan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Hernawati, Fransiska Rena, 2009, *Pelaksanaan Koordinasi Horizontal Antara Kejaksaan Dengan Kepolisian Dalam Proses Pra Penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan dan Kepolisian Resort Sukoharjo)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Indracahya, Reza, 2016, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Dihubungkan Dengan Prapenuntutan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Bandung.

Madalina, 2006, *Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Malamassam, Jhon Ilef, 2012, *Optimalisasi Prapenuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.

Marono, Ericha Cahyo, 2014, *Kendala Yang Dihadapi Jaksa Penuntut Umum Untuk Melakukan Pra Penuntutan Dalam Rangka Proses Penuntutan Tindak Pidana Umum (Studi di Kejaksaan Negeri Malang)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.

Masri, Moh Andalusia, 2015, *Pelaksanaan Prapenuntutan Dalam Kaitannya Dengan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan (Studi di Kejaksaan Tinggi Aceh)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Univeristas Syiah Kuala, Aceh.

Pangestu, Wiratih Dwi, 2008, *Pengaturan Asas Contante Justitie Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Semarang.

Rohman, Arif, 2009, *Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Salah Tangkap Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Yusuf, Zigriya Anibaya, 2014, *Pelaksanaan Koordinasi Horizontal Antara Kejaksaan Dengan Kepolisian Dalam Proses Pra Penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan dan Kepolisian Resort Sukoharjo)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Zikry, Ichsan, Adery Ardhan dan Ayu Eza Tiara, 2016, *Prapenuntutan Sekarang Ratusan Ribu Perkara Disimpan Puluhan Ribu Perkara Hilang*, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, MAPPI FH UI.

#### D. Risalah Sidang

Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor 123/PUU-XIII/2015 dan Perkara Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 27 April 2016.

Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor 123/PUU-XIII/2015 dan Perkara Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 8 Maret 2016.

#### E. Internet

-----, 2015, "Pengertian Peradilan Menurut Para Ahli", , <http://www.ahliartikel.com/2015/12/pengertian-peradilan-menurut-para-ahli.html>, diakses tanggal 11 Desember 2016.

Alief, Bisma, 2016, "Dianggap Jadi Masalah di Sistem Peradilan, Aturan Prapenuntutan Diuji ke MK", <http://news.detik.com/berita/3173776/dianggap-jadi-masalah-di-sistem-peradilan-aturan-prapenuntutan-diuji-ke-mk>, diakses tanggal 23 September 2016.

Anjasari, Lulu, 2016, "Ahli: Pelimpahan Perkara Tak Berbatas Waktu Lemahkan Penegakan Hukum", <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=13082>, diakses tanggal 10 November 2016.

Switzy Sabandar, 2015, "3 Kasus Korupsi Jogja Terancam Berhenti", <http://harianjogja.bisnis.com/read/20150723/1/2088/3-kasus-korupsi-jogja-terancam-berhenti>, diakses tanggal 27 Desember 2016.

Santoso, Topo, 2001, “Polisi dan Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, <https://www.library.ohiou.edu/indopubs/2001/09/05/0028.html>, diakses tanggal 8 Desember 2016.

Sunartono, 2015, “Di DIY, Aksi Kejahatan Terjadi Tiap 72 Menit Sekali”, <http://www.harianjogja.com/baca/2015/12/30/kriminalitas-di-diy-aksi-kejahatan-terjadi-tiap-72-menit-sekali-675931>, diakses tanggal 24 November 2016.

Badan Pusat Statistik, 2016, “Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi Tahun 2000-2015”, <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/842>, diakses tanggal 01 Juni 2017.

Badan Pusat Statistik, 2016, “Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah Tahun 2000-2015”, <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1570>, diakses tanggal 01 Juni 2017.